

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah yang maha kuasa, sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dapat terselesaikan.

Berdasarkan Perbup Rembang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang. Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang tahun 2020 merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan harapan majunya masyarakat Rembang pada umumnya dan lebih khusus terselenggaranya sistem komunikasi dan informatika yang handal melalui pengelolaan yang profesional guna menunjang kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Rembang sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas harus disertai dengan kerja keras dan kerja sama dari semua pihak, oleh sebab itu melalui kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sepenuhnya baik langsung maupun tidak langsung atas selesainya rencana kerja perubahan TA 2020 (Renja Perubahan) ini,

semoga mendapat Rahmat Tuhan yang maha kuasa, Amin.

Rembang, 15 Juli 2020

An. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIS



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN DINKOMINFO KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020.....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2017–2021.....	11
2.2 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	16
2.3 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	17
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	17
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG....	19
3.1 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan	

Informatika Kabupaten Rembang.....	19
3.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Komunikasi	
Informatika Kabupaten Rembang.....	22
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	24
BAB V PENUTUP.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Kinerja dan Indikator Program Tahun anggaran Perubahan 2020.....	11
Tabel 2.2	Target dan Capaian Indikator Program Urusan Dinkominfo Tahun 2019–2020.....	12
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2014–2019.....	14
Tabel 2.4	Tujuan, dan Sasaran, Indikator Sasaran Tahun 2020–2021.....	15
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Jangka Menengah Tahun 2020–2021.....	21
Tabel 3.2	Strategi dan Kebijakan.....	23
Tabel 4.1	Ranwal RKPD dan Hasil KUA PPAS.....	24
Tabel 4.2	Rincian Rencana Kerja dan Pendanaan.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang adalah dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2020 dan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2020. Penyusunan Renja Dinas mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan pembangunan infrastruktur IT, sumber daya manusia IT, *single data system* sesuai dengan potensi sumber daya tersedia, dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum didalam RKPD dan menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016–2021.

Urusan Pemerintahan Bidang Kominfo, Statistik, dan Persandian menjadi sektor andalan Dinas Kominfo Kabupaten Rembang. Peran tersebut ditempuh melalui perumusan, pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan informasi serta

komunikasi publik, penyelenggaraan statistik sektoral, domain instansi penyelenggara negara, persandian dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2018);

6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang–Undang Nomor 61 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.61);
9. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang–

Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Rembang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Rembang Nomor 1 Tahun 2010);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011–2031;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

28. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2020 adalah untuk :

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan Kominfo, Persandian dan Statistik Tahun 2020.
2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kominfo, Persandian dan Statistik Tahun 2020.

Adapun tujuannya adalah untuk :

1. Memberikan landasan operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Menjadi landasan penyusunan usulan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran Perubahan 2020 melalui penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun AnggaranPerubahan 2020.
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
4. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan Kominfo, Persandian dan Statistik antar tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan regional dan nasional.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang mengacu sistematika sebagaimana termuat di dalam Permendagri 86 tahun 2017 pada Lampiran VI, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinkominfo

Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2019 dan
TA 2020

2.2 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.4 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Renja Dinkominfo
2020

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinkominfo

3.2 Strategi dan Kebijakan Dinkominfo

BAB IV Rencana Kerja Pendanaan

BAB V Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJAPERUBAHAN DINKOMINFO
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2020 dan Capaian

Renstra Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2017–2021.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja dan indikator program maupun sasaran pada tahun anggaran 2020 total anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang sebagai berikut :

Tabel 2.1

Target Kinerja dan Indikator Program Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran Tahunan									Keterangan	
		2018			2019			2020				
		Anggaran	Pendapatan	%	Anggaran	Pendapatan	%	Anggaran	Pendapatan Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	pendapatan	356.745.000	372.827.909	95,69 %	362.000.000	374.285.193	96,72 %	217.200.000	-	-		Akhir Desember
2	Belanja tidak langsung	2.452.484.000	2.398.293.994	97,79 %	2.612.710.728	2.557.397.996	97,88 %	2.727.639.000	-	-		
3	Belanja langsung	2.412.000.000	2.365.516.434	98,07 %	5.429.797.000	5.118.176.296	94,26 %	2.660.043.000	926.634.168	34,84 %		

Dan capaian kinerja selama tahun yang berlalu akan disajikan dalam bentuk tabel yang memuat target dan capaian kinerja untuk

urusan Bidang Komunikasi dan Informatika yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Target dan Capaian Indikator Program Urusan
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019–2020

OPD	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN	
				2020	
				TARGET	Rp
	2	3	4	5	6
DINKOMINFO	1. Urusan Komunikasi dan Informatika				1.360.710.061
	Program Pengembangan Informasi dan Pengelolaan Komunikasi Publik				277.800.061
		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	%	100	
		Pembinaan Layanan Kehumasan	%	100	
	Program Pengembangan E-Government				1.082.910.000
		Pengembangan dan Optimalisasi pengelolaan E-Government	skor	2,75	

OPD	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN	
				2020	
				TARGET	Rp
	2	3	4	5	6
		Pengelolaan dan pengembangan data elektronik	%	50	
DINKOMINFO	2. Urusan Statistik				200.680.000
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				200.680.000
		Penyusunan Data Statistik	%	90	
DINKOMINFO	3. Urusan Persandian				52.180.000
	Program pengelolaan dan pengembangan persandian daerah				52.180.000
		persentase pengguna layanan informasi melalui peralatan dan jaringan telekomunikasi terlayani dan terlindungi keamanannya	%	100	

Gambaran kinerja Dinkominfo tiga tahun sebelumnya (2017, 2018, 2019) diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinhubkominfo Kab.Rembang, mengingat Dinkominfo Kabupaten Rembang adalah SKPD yang baru dibentuk. Gambaran kinerja tersebut adalah untuk memberikan evaluasi Renja Tahun 2017 dan capaian Renstra Dinkominfo sampai dengan Tahun 2017, selengkapnya dapat dilihat pada

tabel 1 untuk capaian Renstra (Per Urusan dan Per Program) dan tabel 2 untuk capaian realisasi anggaran.

2.1.1 Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Rembang

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang 5 (lima)

tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinkominfo
Kabupaten Rembang Tahun 2014–2019

No.	Indikator	Capaian Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I							
1	Jumlah Jaringan Komunikasi	29	58	62	62	165	–
2	Jumlah Penyiaran Radio	14	14	14	14	14	–
3	Cakupan Layanan SST	5.500	5.500	5.500	5.450	5.500	–
4	Jumlah aplikasi e – government di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota	15	20	20	20	22	–
5	Persentase PD telah memiliki website (%)	86,97	86,97	100	100	100	100
6	Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	21	21	21	21	21	21
II	Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui :						
1	Media Massa seperti majalah, radio dan televisi;	14	14	14	14	14	14
2	Media baru seperti website (media online)	1	1	1	1	1	1
3	Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	1	1	1	1	1	1
4	Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah / diskusi	–	–		–	–	–

No.	Indikator	Capaian Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	dan lokakarya; dan / atau						
5	Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho	2	2	2	2	2	2
III 1	Cakupan Pengawasan menara BTS di Kabupaten Rembang	135	131	148	156	161	165
2	Jumlah prosentase pengawasan radio siaran dan radio Komunikasi	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.4
Tujuan dan Sasaran, Indikator Sasaran
Kabupaten Rembang Tahun 2020–2021

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di dukung SDM yang tangguh	Nilai Sakip OPD	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan	Nilai komponen perencanaan, pengukuran kinerja, evaluasi, capaian dalam penilaian SAKIP (formulasi : jumlah capaian indikator kinerja/jumlah target indikator kinerja)

2	Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ketertiban masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik.	Nilai keterbukaan informasi publik (formulasi diukur oleh kominfo)
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan komunikasi dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan E-Government. - Meningkatkan pelayanan informasi publik, cepat tanggap dan transparan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks SPBE - Skor KIP (Formulasi = skor keterbukaan informasi publik)
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Meningkatnya ketersediaan data statistik.	Persentase pelayanan informasi publik cepat tanggap dan transparan
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Meningkatnya keamanan persandian daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi) Dengan Formulasi Skor responden : Skor Maksimal X 100 %

		informasi		
--	--	-----------	--	--

2.2 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu–isu yang penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinkominfo Kabupaten Rembang dapat tergambarkan melalui isu strategis yaitu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Dinkominfo Kabupaten Rembang yaitu :

Belum optimalnya akuntabilitas kinerja di dukung SDM yang tangguh.

1. Belum optimalnya pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ketertiban masyarakat.
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan dalam pelayanan komunikasi dan informasi.

2.3. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.3.1. Identifikasi Program/Kegiatan Yang Tercantum Rancangan Awal RKPD.

Hasil identifikasi dari program/kegiatan Dinkominfo Kabupaten Rembang semua telah terakomodir dalam rancangan awal RKPD.

2.3.2. Perbandingan Rancangan Awal RKPD dengan Analisis Kebutuhan.

Dari hasil pencermatan internal terdapat adanya perbedaan antara anggaran yang diusulkan (ideal) dengan anggaran pada rancangan RKPD. Walaupun adanya efisiensi anggaran tapi tidak mengurangi target berdasarkan hasil pembahasan perencanaan kerja.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Proses perencanaan atau *planning* adalah bagian dari daur kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan (*decision making*) untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Salah satu proses atau perencanaan yang sering dilakukan dalam melakukan pembangunan adalah dengan menggunakan sistem pembangunan yang bersifat *Bottom-Up*. *Bottom-Up Planning* adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator dalam hal ini

atasan merupakan pemerintah dan bawahan merupakan masyarakat, swasta serta pemangku kepentingan. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang pada saat ini belum ada jaring aspirasi DPRD Kabupaten Rembang terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Dalam hal ini belum ada usulan aspirasi masyarakat yang ikut berperan serta dalam Pembangunan Kabupaten Rembang yang diwakilkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

Terkait usulan sektoral Kabupaten Rembang yaitu program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, dengan kegiatan akses internet dan jaringan interkoneksi pendukung Jateng Online bagi seluruh SKPD Provinsi, usulan senilai Rp. **1.082.910.000,-** setelah Revocusing covid-19 dengan output kegiatan terwujudnya jaringan internet dengan menggunakan fiber optik di Kabupaten Rembang tidak dapat kami akomodir melalui program/kegiatan Dinkominfo Kabupaten Rembang tahun 2018, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila usulan dimasukan melalui mekanisme usulan bantuan keuangan yang nantinya akan diputuskan oleh TAPD Pemerintah Kabupaten Rembang.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG

3.1 Tujuan, Sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang

Memperhatikan visi Pemerintahan Kabupaten Rembang yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang 2016 – 2021 yang memiliki satu visi yang akan diwujudkan melalui tujuh misi, maka dalam rangka mendukung visi misi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang sebagai satuan kerja yang memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan kedepan. Sebagai penjabaran dan implementasi atas visi dan misi yang telah ditetapkan, pada tahun 2016–2021 terdapat tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

3.1.1 Tujuan OPD

Adapun yang ditetapkan dalam strategi ataupun upaya-upaya yang akan dilaksanakan guna menunjang keberhasilan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang antara lain:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja di dukung SDM yang tangguh

2. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ketertiban masyarakat
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan komunikasi dan informasi

3.1.2 Indikator Tujuan OPD

Indikator sasaran yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dalam mencapai tujuan diatas antara lain:

1. Nilai Sakip OPD
2. Indeks kepuasan masyarakat
3. Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan komunikasi dan informasi

3.1.2 Sasaran OPD

Sasaran yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dalam mencapai tujuan diatas antara lain:

1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik.
3. Meningkatkan E-Government.

4. Meningkatnya pelayanan informasi publik, cepat tanggap dan transparan.
5. Meningkatnya ketersediaan data statistik.
6. Meningkatnya keamanan persandian daerah

3.1.3 Indikator Sasaran OPD

Indikator sasaran yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dalam mencapai tujuan diatas antara lain:

1. Nilai komponen perencanaan, pengukuran kinerja, evaluasi, capaian dalam penilaian SAKIP (formulasi : jumlah capaian indikator kinerja/jumlah target indikator kinerja)
2. Nilai keterbukaan informasi publik (formulasi diukur oleh kominfo)
3. Indeks SPBE
4. Skor KIP (Formulasi = skor keterbukaan informasi publik)(Formulasi = skor keterbukaan informasi publik)
5. Persentase pelayanan informasi publik cepat tanggap dan transparan
6. Indeks KAMI (Keamanan Informasi) dengan Formulasi Skor responden : Skor Maksimal X 100 %

Tabel 3.1

Tujuan , Sasaran, Indikator Sasaran Jangka Menengah

Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di dukung SDM yang tangguh	Nilai Sakip OPD	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan	Nilai komponen perencanaan, pengukuran kinerja, evaluasi, capaian dalam penilaian SAKIP (formulasi : jumlah capaian indikator kinerja/jumlah target indikator kinerja)
2	Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ketertiban masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik.	Nilai keterbukaan informasi publik (formulasi diukur oleh kominfo)
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan komunikasi dan informasi	– Meningkatkan E–Government. – Meningkatkan pelayanan informasi publik, cepat tanggap dan transparan	– Indeks SPBE – Skor KIP (Formulasi = skor keterbukaan informasi publik)
4	Meningkatnya	Indeks kepuasan	Meningkatnya	Persentase

	kualitas pelayanan publik dalam pelayanan komunikasi dan informasi	masyarakat dalam pelayanan komunikasi dan informasi	ketersediaan data statistik.	pelayanan informasi publik cepat tanggap dan transparan
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Meningkatnya keamanan persandian daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi) Dengan Formulasi Skor responden : Skor Maksimal X 100 %

3.2 Strategi dan Kebijakan jangka menengah Dinas Komunikasi Dan Informatika

3.2.1 Strategi

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang perlu faktor pendukung yang merupakan nilai-nilai strategis yang dimiliki sesuai dengan bidang tugas kewenangan dinas sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Peningkatan sistem pelayanan publik dan penguatan pengelolaan informasi dan komunikasi
3. Peningkatan kemampuan SDM dan teknologi informasi dan komunikasi

3.2.2 Arah Kebijakan

1. Peningkatan kualitas dan sistem perencanaan kinerja yang matang
2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM bidang informasi dan telekomunikasi secara berkelanjutan tuntutan kemajuan

teknologi

Tabel 3.2
Tabel Strategi dan Kebijakan

No	Tujuan OPD	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja didukung SDM yang tangguh	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan kualitas dan sistem perencanaan kinerja yang matang
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Pengelolaan sistem pelayanan publik dan penguatan pengelolaan informasi dan komunikasi	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan komunikasi dan informasi	Peningkatan kemampuan SDM dan teknologi informasi dan komunikasi	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM bidang informasi dan telekomunikasi secara berkelanjutan tuntutan kemajuan teknologi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2020 mengusulkan rancangan awal dan hasil yang disetujui KUA/PPAS sebagai berikut :

Tabel 4.1
Usulan Ranwal RKPD dan Hasil KUA PPAS

No	Uraian	Ranwal RKPD	KUA PPAS
1	Pendapatan	Rp. 217.200.000	Rp 217.200.000
2	Belanja tidak langsung	Rp2.727.639.000	Rp. 2.727.639.000
3	Belanja langsung	Rp 6.140.700.000	Rp. 2.660.043.000
Total		Rp. 8.506.339.000	Rp. 5.170.482.000

Selanjutnya Rincian Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran Perubahan 2020.

Tabel 4.2

Rincian Rencana Kerja dan Pendanaan

KODE REKENING	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/PEKERJAAN			PAGU			Jumlah Perubahan (+/-) (Rp)	Keterangan
	INDUK 2020	REFOCUSING (Rp)	MENJADI	RENJA 2020 (INDUK) (Rp)	REFOCUSING (Rp)	MENJADI (Rp)		
2.10.2.10.01.01.07	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	1.342.700.000	1.018.976.439	1.024.975.839	5.999.400	
2.10.2.10.01.01.07.01	Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum	Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum	Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum	1.140.700.000	981.164.600	958.958.000	(22.206.600)	
	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	30.000.000	14.250.000	17.250.000	3.000.000	Tetap
	Penyediaan Administrasi Keuangan	Penyediaan Administrasi Keuangan	Penyediaan Administrasi Keuangan	160.000.000	149.900.000	125.900.000	(24.000.000)	Berkurang
	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor / Kebersihan	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor / Kebersihan	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor / Kebersihan	263.200.000	261.888.000	258.896.000	(2.992.000)	Tetap
	Rapat-rapat koordinasi luar daerah	Rapat-rapat koordinasi luar daerah	Rapat-rapat koordinasi luar daerah	130.000.000	23.500.000	23.500.000	-	Tetap

	Penyediaan Belanja cetak dan penggandaan	Penyediaan Belanja cetak dan penggandaan	Penyediaan Belanja cetak dan penggandaan	10.000.000	4.857.000	4.857.000	-	Tetap
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	1.945.000	1.945.000	-	Tetap
	Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Listrik dan Telpon	Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Listrik dan Telpon	Penyediaan Jasa Sumber Daya Air, Listrik dan Telpon	490.000.000	481.000.000	478.000.000	(3.000.000)	Berkurang
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	5.000.000	1.714.600	5.000.000	3.285.400	Bertambah
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Tetap
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.000.000	3.500.000	5.000.000	1.500.000	Bertambah
	Penyediaan Bahan Bacaan	Penyediaan Bahan Bacaan	Penyediaan Bahan Bacaan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	Tetap
	Penyediaan Jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa surat menyurat	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	Tetap
	Penyediaan Makan Minum	Penyediaan Makan Minum	Penyediaan Makan Minum	25.000.000	23.110.000	23.110.000	-	Tetap
2.10.2.10.01.01.07.02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	147.000.000	17.884.000	37.090.000	19.206.000	
	Pemel. Rtn Kend. Dinas / Opsional	Pemel. Rtn Kend. Dinas / Opsional	Pemel. Rtn Kend. Dinas / Opsional	30.000.000	11.525.000	20.000.000	8.475.000	Bertambah
	Pemel. Rtn Berkala Perlengkapan Kantor	Pemel. Rtn Berkala Perlengkapan Kantor	Pemel. Rtn Berkala Perlengkapan Kantor	10.000.000	3.046.000	6.000.000	2.954.000	Bertambah

	Pemel.Rtn. Berkala Peralatan kantor	Pemel.Rtn. Berkala Peralatan kantor	Pemel.Rtn. Berkala Peralatan kantor	20.000.000	3.140.000	9.090.000	5.950.000	Bertambah
	Pemel. Rtn Berkala Gedung kantor	Pemel. Rtn Berkala Gedung kantor	Pemel. Rtn Berkala Gedung kantor	15.000.000	173.000	2.000.000	1.827.000	Bertambah
	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	72.000.000	-	-	-	
2.10.2.10.01.01.07.03	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	10.000.000	6.500.000	12.600.000	6.100.000	
	Peningkatan Maturitas SPIP OPD	Peningkatan Maturitas SPIP OPD	Peningkatan Maturitas SPIP OPD	10.000.000	6.500.000	12.600.000	6.100.000	Bertambah
2.10.2.10.01.01.07.04	Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	45.000.000	13.427.839	16.327.839	2.900.000	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	10.000.000	1.500.000	1.800.000	300.000	Bertambah
	Penatausahaan Aset Barang Milik Daerah	Penatausahaan Aset Barang Milik Daerah	Penatausahaan Aset Barang Milik Daerah	15.000.000	7.600.000	8.900.000	1.300.000	Bertambah
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	10.000.000	1.500.000	1.800.000	300.000	Bertambah
	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	10.000.000	2.827.839	3.827.839	1.000.000	Bertambah
2.10.2.10.01.01.08	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	25.700.000	27.200.000	1.500.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	30.000.000	19.000.000	20.500.000	1.500.000	Bertambah

	Perangkat Daerah	Daerah	Daerah					
2.10.2.10.01.01.08.01	Penyusunan Renstra, Renja	Penyusunan Renstra, Renja	Penyusunan Renstra, Renja	30.000.000	19.000.000	20.500.000	1.500.000	Bertambah
2.10.2.10.01.01.08.01	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	10.000.000	6.700.000	6.700.000	-	Tetap
	Penyusunan LKJIP dan LPPD	Penyusunan LKJIP dan LPPD	Penyusunan LKJIP dan LPPD	10.000.000	6.700.000	6.700.000	-	Tetap
2.10.2.10.01.01.09	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	10.000.000	1.796.500	1.796.500	-	
2.10.2.10.01.01.09.01	Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik	Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik	Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik	10.000.000	1.796.500	1.796.500	-	
	Pengeleolaan Informasi Publik	Pengeleolaan Informasi Publik	Pengeleolaan Informasi Publik	10.000.000	1.796.500	1.796.500	-	Tetap
2.10.2.10.01.01.71	Program Pengembangan Informasi dan Pengelolaan Komunikasi Publik	Program Pengembangan Informasi dan Pengelolaan Komunikasi Publik	Program Pengembangan Informasi dan Pengelolaan Komunikasi Publik	535.000.000	277.800.061	346.379.113	89.800.000	
2.10.2.10.01.01.71.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	405.000.000	247.025.061	315.604.113	89.800.000	
	PPID	PPID		75.557.724	61.379.113	66.379.113	5.000.000	Bertambah
	Penyebarluasan Informasi	Penyebarluasan Informasi		50.000.000	540.948	-	-	Tetap

	Pengembangan dan Pengelolaan Website	Pengembangan dan Pengelolaan Website		74.999.740	67.850.000	118.200.000	50.350.000	Bertambah
	Layanan Aduan Masyarakat	Layanan Aduan Masyarakat		75.004.096	45.625.000	74.575.000	28.950.000	Bertambah
	Pengawasan dan Pembinaan Radio	Pengawasan dan Pembinaan Radio		31.486.550	-	-	-	
	Pengendalian Menara	Pengendalian Menara		64.999.400	50.950.000	56.450.000	5.500.000	Tambah
	Isu Publik Media	Isu Publik Media		32.952.490	20.680.000	-	-	
2.10.2.10.01.01.71.04	Pembinaan Layanan Kehumasan	Pembinaan Layanan Kehumasan	Pembinaan Layanan Kehumasan	130.000.000	30.775.000	30.775.000	-	Tetap
	Pengembangan SDM Komunikasi dan Kehumasan	Pengembangan SDM Komunikasi dan Kehumasan		26.500.050	600.000	600.000	-	Tetap
	Pengembangan KIM dan FK Metra	Pengembangan KIM dan FK Metra		103.499.950	30.175.000	30.175.000	-	Tetap
2.10.2.10.01.01.72	Program Pengembangan E-Governmnet	Program Pengembangan E-Governmnet	Program Pengembangan E-Governmnet	3.663.000.000	1.082.910.000	1.039.700.000	(43.210.000)	
2.10.2.10.01.01.72.01	Pengembangan dan Optimalisasi Pengelolaan E-Government	Pengembangan dan Optimalisasi Pengelolaan E-Government	Pengembangan dan Optimalisasi Pengelolaan E-Government	3.218.000.000	860.220.000	833.260.000	(26.960.000)	
	Pengawasan dan Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi(DID)	Pengawasan dan Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi(DID)	Pengawasan dan Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi(DID)	50.000.000	24.160.000	500.000	(23.660.000)	Berkurang

Penyusunan dan Pengembangan Aplikasi Pemerintah Daerah(DID)	Penyusunan dan Pengembangan Aplikasi Pemerintah Daerah(DID)	Penyusunan dan Pengembangan Aplikasi Pemerintah Daerah(DID)	100.000.000	100.000.000	100.600.000	600.000	Bertambah
Pemeliharaan Jaringan dan Menara Wave LAN (DID)	Pemeliharaan Jaringan dan Menara Wave LAN (DID)	Pemeliharaan Jaringan dan Menara Wave LAN (DID)	180.000.000	180.000.000	185.000.000	5.000.000	Bertambah
Pelatihan SDM Komunikasi dan Informasi	Pelatihan SDM Komunikasi dan Informasi	Pelatihan SDM Komunikasi dan Informasi	25.000.000	5.060.000	5.060.000	-	Tetap
Fasilitasi Pengadaan Sarpras TI Pengadilan Agama Rembang	Fasilitasi Pengadaan Sarpras TI Pengadilan Agama Rembang	Fasilitasi Pengadaan Sarpras TI Pengadilan Agama Rembang	200.000.000	200.000.000	191.100.000	(8.900.000)	Berkurang
Fasilitasi Pengadaan Sarpras TI Kejaksaan Negeri Rembang	Fasilitasi Pengadaan Sarpras TI Kejaksaan Negeri Rembang	-	553.000.000	-	-	-	
Belanja Modal (Pengadaan Infrastruktur Jaringan Mall Pelayanan (DID))	Belanja Modal (Pengadaan Infrastruktur Jaringan Mall Pelayanan (DID))	-	300.000.000	-	-	-	
Belanja Modal (Pemeliharaan Jaringan FO)(DID)	Belanja Modal (Pemeliharaan Jaringan FO)(DID)	Belanja Modal (Pemeliharaan Jaringan FO)(DID)	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	Tetap
Belanja Modal (Pengembangan Data Center	Belanja Modal (Pengembangan Data Center	-	100.000.000	-	-	-	
Belanja Modal Peralatan Jaringan Lain-lain (Pengadaan Infrastruktur dan Jaringan Fiber	Belanja Modal Peralatan Jaringan Lain-lain (Pengadaan Infrastruktur dan Jaringan Fiber	Belanja Modal Peralatan Jaringan Lain-lain (Pengadaan Infrastruktur dan Jaringan Fiber	1.260.000.000	51.000.000	51.000.000	-	Tetap

	Optic(Rembang – Sulang dan Rembang – Lasem) – (DID))	Optic(Rembang – Sulang dan Rembang – Lasem) – (DID))	Optic(Rembang – Sulang dan Rembang – Lasem) – (DID))					
	Belanja Modal (Pengadaan Server)(DID)	Belanja Modal (Pengadaan Server)(DID)	Belanja Modal (Pengadaan Server)(DID)	350.000.000	200.000.000	200.000.000	–	Tetap
2.10.2.10.01.01.72.02	Pengelolaan dan Pengembangan data elektronik	Pengelolaan dan Pengembangan data elektronik	Pengelolaan dan Pengembangan data elektronik	445.000.000	222.690.000	206.440.000	(16.250.000)	
	Pengelolaan dan Pemeliharaan Web Server & Database Server	Pengelolaan dan Pemeliharaan Web Server & Database Server	Pengelolaan dan Pemeliharaan Web Server & Database Server	120.000.000	62.970.000	62.020.000	(950.000)	Berkurang
	Fasilitasi SPBE	Fasilitasi SPBE	Fasilitasi SPBE	225.000.000	87.770.000	29.070.000	(58.700.000)	Berkurang
	Pengelolaan SDS & Rembang Dashboard	Pengelolaan SDS & Rembang Dashboard	Pengelolaan SDS & Rembang Dashboard	100.000.000	71.950.000	65.350.000	(6.600.000)	Berkurang
	Belanja Modal (Pengadaan Peralatan Komputer)– Pengadaan Peralatan Pendukung Pengelolaan Data & Aplikasi	Belanja Modal (Pengadaan Peralatan Komputer)– Pengadaan Peralatan Pendukung Pengelolaan Data & Aplikasi	Belanja Modal (Pengadaan Peralatan Komputer)– Pengadaan Peralatan Pendukung Pengelolaan Data & Aplikasi	–	–	50.000.000	50.000.000	Bertambah

2.14.2.10.01.71	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	375.000.000	200.680.000	161.280.000	(39.400.000)	
2.14.2.10.01.71.01	Penyusunan Data Statistik	Penyusunan Data Statistik	Penyusunan Data Statistik	375.000.000	200.680.000	161.280.000	(39.400.000)	
	Pengelolaan Open Data	Pengelolaan Open Data		50.000.000	8.212.500	8.212.500	-	Tetap
	Peningkatan Kapasitas Pengelola Statistik Sektoral	Peningkatan Kapasitas Pengelola Statistik Sektoral		100.000.000	94.315.000	94.315.000	-	Tetap
	Publikasi Statistik Dasar	Publikasi Statistik Dasar		50.000.000	196.250	196.250	-	Tetap
	Pengelolaan Statistik Sektoral Strategis	Pengelolaan Statistik Sektoral Strategis		175.000.000	97.956.250	58.556.250	(39.400.000)	Berkurang
2.15.2.10.01.01.71	Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	175.000.000	52.180.000	85.580.000	33.400.000	
2.15.2.10.01.01.71.01	Pengelolaan Persandian Daerah	Pengelolaan Persandian Daerah	Pengelolaan Persandian Daerah	175.000.000	52.180.000	85.580.000	33.400.000	

	Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi	Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi	Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi	25.000.000	2.180.000	35.780.000	33.600.000	Bertambah
	Belanja Modal (Pengadaan Alat Studio & Komunikasi)	Belanja Modal (Pengadaan Alat Studio & Komunikasi)	Belanja Modal (Pengadaan Alat Studio & Komunikasi)	50.000.000	50.000.000	49.800.000	(200.000)	Berkurang
	Belanja Modal (Pengadaan Alat Komunikasi Sosial) Fasilitasi KAMI)	Belanja Modal (Pengadaan Alat Komunikasi Sosial) Fasilitasi KAMI)	-	100.000.000	-	-	-	
J U M L A H				6.140.700.000	2.660.043.000	2.686.911.452	48.089.400	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan TA 2020 (Renja Perubahan) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2020 perubahan, didasarkan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2019 perubahan, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2016–2021 dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Perubahan Kabupaten Rembang Tahun 2016–2021, dan berbagai kebijakan umum pembangunan kominfo, persandian dan statistik dengan memperhatikan berbagai perkembangan isu–isu terutama dalam mendukung Pelayanan Pemerintah Kabupaten Rembang Berbasis Elektronik dan perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal.

Diharapkan melalui renja yang disusun dengan mekanisme perencanaan yang semakin komprehensif dan terpadu ini, kinerja pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dapat semakin terfokus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual yang masih dihadapi saat ini.